

Percikan

**PEMIKIRAN TENTANG
SOSIOLOGI POLITIK**



Editor

Vina Salyana DS

**ORANG KUAT PARTAI DI ARAS LOKAL :
BLATER VERSUS LORA DALAM PERCATURAN POLITIK**

Oleh : Jainuri

A. Pendahuluan

Kata elite selalu menarik perhatian, justru karena ia sering diartikan sebagai “orang-orang yang menentukan”. Kalau Thomas Carlyle berpendapat sejarah adalah “Riwayat hidup para pembesar”, maka tentu dapat dikatakan bahwa para elitelah penentu sejarah itu. Tapi siapakah “orang besar” alias “wong gede”- untuk membedakan dengan “wong cilik” alias rakyat biasa itu. Kata elite menurut Bottomore, (Haris : 2006), digunakan pada abad ketujuh belas untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul , misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Dalam bahasa Inggris penggunaan awal kata elite menurut *Oxford English Dictionary* adalah pada tahun 1823, ketika kata itu telah diterapkan untuk kelompok-kelompok sosial. Namun istilah itu belum digunakan secara luas dalam tulisan-tulisan sosial dan politik hingga abad kesembilan belas di Eropa, atau hingga tahun 1930-an di Inggris dan Amerika, ketika itu disebarkan melalui teori-teori sosiologis tentang elite, terutama dalam tulisan-tulisan Vilfredo Pareto.

Terminologi elite sebagaimana yang dijelaskan Haryanto (1990 : 6) : “senantiasa menunjuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu, dimana dengan keunggulan yang melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu”. Sementara untuk mengidentifikasi peran elite dalam pembuatan kebijakan beberapa ahli seperti Lasswell, Mill dan Putnam melihatnya dari dimensi yang berbeda. Menurut Laswell, elite adalah individu-individu yang meraih nilai-nilai tertinggi dalam masyarakat karena kecakapannya terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Lainnya halnya dengan Mills yang melihat peran elite dalam kebijakan karena posisi tertinggi individu-individu dalam institusi sedangkan Putnam membaginya dalam dua kategori yaitu elite yang mempunyai pengaruh langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan elite yang pengaruhnya tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan (Budiarjo :1991).

Meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elite namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elite merujuk pada suatu kelompok dalam masyarakat yang mempunyai posisi utama dalam struktur

masyarakat yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Keunggulan elite atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan. (Masoed : 200, 11) Elite merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki wewenang politik. Kelas elite ini terdiri dari minoritas terorganisasi yang memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, khususnya dalam demokrasi.

Tentang elite dan kekuasaan, Varma (2001 : 198) berargumen : "Apa yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut". Keinginan berebut kuasa dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik antar elite di dunia politik.

Tulisan ini ingin menelisik-menelusur tentang elite partai di aras lokal, dalam penelitian yang saya lakukan di salah satu partai politik di kota Malang ditemukan variasi, relasi dan interaksi antar elite : orang kuat *blater* bernepotis dengan elite oligarki dan orang kuat *lora* bersinergi elite demokratis dalam rangka berebut kekuasaan. Kemudian menbantahkan strategi mereka mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan secara terorganisir di partai politik dengan cara demokratis atau sebaliknya.

B. Konstruksi Teori Elite

1. Teori Elite

Asumsi teori elite (Varma : 2001, 197) mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori : 1) Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut : (a.) Elite yang berkuasa dan (b.) Elite yang tidak berkuasa. 2). Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. elite yang berkuasa jumlahnya relatif sedikit, mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang baik, misalnya : kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan rakyat dan lain-lain, tetapi, kekuasaannya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya :

memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan klan dan keluarganya dalam pemerintahan, menggalang kekuatan untuk memberangus oposisi dan lain-lain. Disamping itu juga terdapat elite yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elite, lapisan elite ini akan menjadi pengganti elite di atasnya jika sewaktu-waktu elite pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, elite ini juga menjadi elite tandingan apabila elite yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalik kekuasaan.

Dalam perubahan sosial kalangan elite adalah sekelompok orang yang memiliki peranan penting, merekalah sebenarnya yang memberi acuan dan memberi arah terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat. Seperti yang di ulas sebelumnya dalam realitasnya elite tidak tunggal (misalnya hanya politisi) ia berasal dari berbagai jenis dan macam elite. Masing-masing dari mereka dalam geraknya membawa *interest*, teknik, cara dan *values* sendiri-sendiri, menurut Rusadi Kartaprawira (2004) *values* itu disebut “nilai antara”. Karena memiliki “nilai antara” sendiri-sendiri, masing-masing elite memiliki peranan yang berbeda-beda dalam perubahan sosial. Karena memegang peranan penting dalam mengelola dan mengendalikan perubahan sosial, hampir dapat dipastikan bahwa dinamika masyarakat suatu negara akan mengikuti perjalanan elite yang dominan, mereka mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan kepentingan “nilai antara” atau arah capaian yang diinginkannya. Tentang elite, nilai antara dan peran mereka dalam perubahan sosial diilustrasikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1

Elite dan Perannya Dalam Perubahan Sosial

No	Elite	Nilai antara/Tujuan /Arah capaian	Peran Elite dalam perubahan sosial
1.	Partai politik	Kekuasaan	Agregasi kepentingan umum
2.	Birokrasi	Efisiensi	Pelayanan umum
3.	Pemimpin spiritual	Makna hidup	Etika
4.	Militer	Kekuatan	Kelangsungan hidup nasional
5.	Cendekiawan	Ilmu Pengetahuan	Kebenaran
6.	Bisnismen	Keuntungan	Kemakmuran, kesejahteraan
7.	Seniman	Seni	Estetika
8.	Media massa	Komunikasi	Kebenaran pragmatik

Sumber : diadopsi dari tulisan Rusadi Kantaprawira¹

Putnam (Haryanto : 2005, 134 - 45) menganalisa peran dan pengaruh elite dari perspektif : posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Perbedaan ketiga perspektif antara lain sebagai berikut : Analisa posisi mengandaikan bahwa : (1). Orang yang berkuasa diantara sekelompok elite adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut; (2). Kekuasaan berkorelasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan; (3). Analisa posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan paling umum dipergunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di lembaga tersebut; (4). Asumsi analisis ini beranggapan sudah diketahui lembaga-lembaga mana yang secara politis penting dan lembaga-lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu; (5). Analisa posisi hanya efektif diterapkan dalam kondisi masyarakat/organisasi yang memiliki distribusi ke kuasaan yang timpang, sementara dalam masyarakat dan organisasi yang distribusi kekuasaan merata analisis ini tidak efektif. Singkatnya analisa ini berasumsi : ”siapa menduduki posisi puncak di suatu organisasi, orang itulah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi”.

Analisa reputasi berasumsi bahwa : (1). Individu yang oleh sesama warga dianggap memiliki pengaruh, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki pengaruh; (2). Individu yang oleh orang dianggap memiliki kekuasaan, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki kekuasaan; (3). Analisa reputasi dilakukan dengan tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal tetapi mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki elite.

Analisa pembuatan keputusan menekankan bahwa : (1). Untuk mengetahui siapa yang berkuasa diantara para elite dengan cara mempelajari proses pembuatan keputusan, perhatian utama dari analisa ini adalah siapa yang banyak berinisiatif dan memberi kontribusi terhadap pembuatan keputusan organisasi, (2). Dari proses ini juga diketahui siapa saja yang menjadi penentang dari proses pembuatan keputusan tersebut; (3). Analisa ini menurut sementara kalangan lebih efektif dibanding analisa posisi dan reputasi. Singkatnya perhatian analisa ini mencari individu-individu yang memainkan peran kunci atau elite penentu menurut Keller (Noer, terj. : 1995, 119) dalam pembuatan keputusan.

Berdasar analisa elite Putnam dan Suzanne Keller seperti diurai diatas yang dimaksud dengan elite penentu, alternatifnya adalah : (1). Orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu organisasi; (2). Orang yang memiliki

¹ Penjelasan aslinya dalam bentuk delapan piramida elite, lihat Rusadi Kantaprawira, Ibid, 214

pengaruh dan reputasi besar dalam organisasi dibanding orang lain; (3). Orang yang memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Namun jika ditemukan dalam suatu organisasi seorang individu tidak dalam posisi puncak namun reputasi dan kemampuan mengambil keputusan lebih besar dibanding orang lain termasuk orang yang sebenarnya menduduki posisi puncak maka orang ini disebut orang kuat (*strongmen*), sementara yang menduduki posisi tetapi kekuasaannya dibawah bayang-bayang orang kuat disebut elite boneka (*toy of elite*). Orang kuat di formulasikan secara sederhana sebagai berikut :

Orang kuat = Posisi < Reputasi + Kontribusi Pengambilan Keputusan

Penjelasannya : (1). Orang kuat adalah orang yang tidak dalam posisi puncak dalam suatu organisasi namun reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan lebih besar dibandingkan orang lain termasuk orang yang menduduki posisi puncak; (2), jika berlangsung di partai, orang kuat partai adalah orang yang tidak menduduki posisi sebagai ketua umum namun reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan lebih besar dibanding ketua umumnya sendiri dan orang orang dilingkaran kekuasaan partai; (3). Jika berlangsung di politik lokal, orang kuat lokal (*local strongmen*) adalah orang yang tidak dalam posisi pemerintah namun kapasitas dan kemampuan pengambilan keputusan di berbagai kebijakan lokal seperti distribusi dan alokasi sumberdaya daerah lebih menentukan dibanding *state apparatus* ditingkat lokal, karena itu orang ini di aras lokal bertindak sebagai boss lokal atau *shadow government*. Dengan demikian munculnya orang kuat bisa berlangsung dimana saja, kapan saja dan di komunitas apa saja, termasuk di partai politik dan di masyarakat seperti uraian tentang studi elite lokal (*local strongmen, bossism*) berikut ini.

2. Studi Elite Lokal

Ada dua kerangka teoritik yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena kemunculan *local strongmen* dalam istilah Migdal atau *Bossism* menurut Sidel. Menurut Migdal, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai pemimpin, dimana pemimpin itu relatif otonom dari negara. Dan setiap masyarakat memiliki *social capacity* yang memungkinkan mereka menerapkan aturan main mereka sendiri tanpa diintervensi oleh negara. Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemah (*weak state*) maka para *strongmen* menapak kekuasaannya dalam *level* lokal. Migdal (2001), menyebutkan strategi *triangle of*

accommodation sebagai strategi *strongmen* untuk bertahan. Dengan demikian, Kehadiran *strongmen* merupakan refleksi dari kuatnya masyarakat.

Migdal (2001 : 256) mengemukakan *local strongmen* bisa sukses karena pengaruh mereka dan bukan aturan resmi yang dibuat : ”*why local strongmen have, through their success at social control often effectively captured parts of third world states*”. Mereka sukses dalam menguasai posisi-posisi penting dan memastikan alokasi sumber daya karena pengaruh mereka (*own rules*), dan bukan karena aturan yang secara resmi dibuat. Ada tiga argumen yang menjelaskan fenomena keberhasilan orang kuat lokal menurut Migdal (2001 : 238-258) :

- a. *Local strongmen telah mengembangkan 'weblike societies' melalui organisasi otonom yang dimiliki, dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial.*
- b. *Local strongmen melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut 'strategies of survival' dari masyarakat lokal. Ini menghasilkan pola personalism, clientalism, dan relasi patron – client.*
- c. *Local strongmen menguasai state agency dan sumber daya, sehingga agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentingan local strongmen. Local strongmen melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara, dan berhasil melemahkan negara dalam proses pencapaian tujuan perubahan sosial.*

Berbeda dengan Migdal, berdasarkan studinya tentang elite lokal di Philipina, Sidel (1999) mengatakan bahwa konsep *bossism* merujuk pada: “*predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within give territorial jurisdictions or bailiwicks*”. Faktor yang menjamin keberlangsungan *bossism* di Philipina : (a). Struktur institusi negara; (b) Konsentrasi modal swasta di daerah sebagai bagian kebijakan negara; (c). Warisan Amerika berupa sistem pemilu Philipina; (d). Keikutsertaan aparat negara pada masa-masa awal *capitalist development*. Sidel berkesimpulan bahwa eksistensi dan keberlangsungan *bossism* merupakan refleksi kekuatan negara. Hal ini berlawanan dengan tesis Migdal “*strong societies and weak states*”. Orang kuat lokal melanggengkan kekuasaannya dengan cara-cara berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, melakukan *stationary bandit* dan *roving bandit* (kriminalitas) (Sidel : 1999,94).

Migdal menyatakan bahwa *local strongmen* dapat bertahan asalkan ia berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, berdasar hal tersebut maka terbentuklah “*triangle of accomodation*”. Ironisnya *triangle* ini mengijinkan sumber daya negara untuk memperkuat *local strongmen* dan organisasinya yang

mengatur *the game conflict*. Lebih lanjut Migdal (2001 : 256) mengemukakan bahwa keberlangsungan *local strongmen* juga tergantung pada kekuatan negara untuk mengatur kontrol mereka; mereka belajar mengakomodasi pemimpin yang populis untuk menangkap organisasi negara pada level yang lebih rendah. Sidel menyatakan, penggunaan *coercive violence* merupakan strategi yang digunakan para bos di Philipina untuk bertahan.

Mancur Olson dalam bukunya *Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorship* menyatakan *stationary bandit* dan *roving bandit* sebagai strategi bertahan *local strongmen*. Istilah tersebut merupakan metafor tindakan kriminalitas yang ia gunakan menganalisa logika kekuasaan dan relasinya dengan kesejahteraan. *Stationary bandit* mencuri dengan strategi seperti yang dikutip Linda (2004) : “*He always make sure there are things to be stolen from society by providing society the protection to carry out business, providing public goods so that society can still reproduce. Being productive then will ensure that there will always be things to be stolen.*” *Roving bandit* merampok sebanyak yang ia bisa dan tidak meninggalkan apapun pada masyarakat. Menurut Olson, *roving bandit* akan menciptakan kemiskinan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Sidel pada tulisan berikutnya melanjutkan analisis tentang *local strongmen* dengan membandingkan kasus di negara Philipina, Thailand dan Indonesia. Khusus di Indonesia *local strongmen* diulas Sidel (2005) dengan *setting* fenomena pemilihan kepala daerah yang melibatkan : politik uang, premanisme, keterlibatan kelompok ekonomi kuat dan keterlibatan kelompok preman. Menurut Sidel pada jaman orde baru *local strongmen* di ilustrasikan sebagai berikut : (a). Konteks pergeseran dari sentralisme kekuasaan ke desentralisasi kekuasaan, berpindahnya kekuasaan “*dari satu Suharto ke banyak Suharto?*”; (b). Orde baru yang monolitik telah melimitasi munculnya *Local Strongmen*, karena semua saluran ke arah kekuasaan ada di satu pintu : Rejim orde baru (Suharto, Golkar, dan AD); (c). Adalah karena organisasi kuasa negara dengan pola sentralistis yang membuat *local strongmen* tidak muncul, dan bukan masyarakat jika pola organisasi kuasa muncul, maka *local strongmen* akan tumbuh. Singkatnya sangat terpusat dan watak dasar otoriter negara zaman Soeharto tidak memungkinkan bagi para ”bos lokal” untuk bermunculan, bertahan hidup, dan tumbuh subur di Indonesia hingga menjelang pergantian abad. (d). Tetapi orde baru juga memfasilitasi munculnya elite lokal antara lain : Pensiunan tentara yang menduduki pos-pos lokal; elite lokal yang mendapatkan kewenangan kontrol

dari negara atas sumber daya ekonomi tertentu (*state lands allocation*); anggota DPRD lokal; dan kepala-kepala desa.

Transisi demokrasi pada tahun 1999 makin memperlebar kemungkinan akumulasi kekuasaan *local strongmen* oleh mafia, jaringan marga di lokalitas seluruh Nusantara. Menurut Sidel (2005) kondisi-kondisi ini kurang lebih sama dengan di Philipina dan Thailand yang diidentifikasi Sidel sebagai berikut : 1). Kompetisi politik yang terbuka di level lokal telah membuka peluang akumulasi kekuasaan di tangan mafia lokal, jaringan, dan klan, 2). Kasus Sumatera Utara : (a). Aktor politik penting berasal dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang hidupnya tergantung dari proyek pemerintah; (b). politisi profesional yang memiliki jaringan dengan partai politik orde baru; (c). Aktifis organisasi mahasiswa/pemuda yg selama ini menjadi *supplier* birokrasi Orde baru; (d). Dari 22 bupati/walikota, 6 adalah pebisnis – berupaya melakukan kontrol atas *state apparatus*; 3). Kasus Aceh : (a). Mafia kayu lokal yang memiliki pengaruh kuat di birokrasi dan lembaga perwakilan; (b). Melalui jaringan pengaruh ini, mafia kayu memastikan pejabat lokal yang terpilih tidak mengancam bisnis mereka; (c). Jaringan yang terbentuk meliputi; bupati, polres & kodim, pejabat lokal dan imam; 4). Kasus Medan : (a). Penguasaan DPRD oleh kelompok preman yang berkompetisi (b). mereka memiliki jaringan dengan pensiunan tentara dan polisi; (c). Walikota adalah pebisnis yang menang terutama melalui pembelian suara dan ancaman.

Sementara studi yang lain seperti yang dilakukan oleh Richard Robinson dan Vedi R Hadis (2004) - di Indonesia tentang perkembangan ekonomi-politik lokal pasca Soeharto ditemukan kecenderungan reorganisasi kekuasaan dari kelompok oligarki, yang menguasai jaringan sosial ekonomi dan politik lokal untuk kepentingan mereka sendiri. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh FISIPOL UGM tahun 2000, memperlihatkan bahwa politik lokal pasca Soeharto ditandai dengan bangkitnya kembali entitas politik masa lalu (*Karaton, Fetor, dan Karaeng*) serta semakin dominannya peranan *Local Boss, the big man* (orang besar) dalam interaksi ekonomi-politik lokal. (Ari Dwipayana : 2005)

Potret buram tentang dinamika politik lokal juga dicermati oleh Okamoto Masaaki (2006) dan teman-temannya, mereka mencermati proses demokrasi di ranah lokal melalui politik desentralisasi dan otonomi daerah, ternyata demokratisasi di level daerah ini banyak di manfaatkan oleh bos-bos lokal untuk merengkuh kekuasaan dengan cara-cara *natifism*, seperti penggunaan sentimen etnik melalui penghadiran mesin-mesin kekerasan di dalam ruang publik, seperti

: *Broker* keamanan di Jakarta; *Jagoan* Betawi, *Jawara* di Banten, *Blater* di Madura, *Pecalang* di Bali dan lain-lain. Fenomena orang kuat dan boss-boss lokal yang merengkuh dan menjalankan kekuasaan dengan jalan *natifism* juga merambah partai politik seperti elaborasi dan studi elite lokal dibawah ini.

C. Studi Elite Partai di Aras Lokal

Elite sebagaimana kita fahami bisa dalam bentuk individu misal “orang kuat partai” atau dalam bentuk kelompok misal elite oligarki. Mereka memainkan peran penting dalam kaitannya dengan alokasi sumber-sumber kekuasaan dan menanamkan pengaruh untuk menguasai partai. Kehadiran mereka di partai politik di aras lokal dapat kita cermati dari tiga dimensi politik : (1). Bagaimana mereka mendapat kekuasaan; (2). Bagaimana mereka menjalankan kekuasaan; (3). Bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan. Tentang elite partai diaras lokal dalam bentuknya individual maupun kelompok diurai berikut ini.

1. Elite Individual : Orang Kuat Partai di Aras Lokal

Dalam dinamika partai politik diaras lokal, kita temukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Suzane keller sebagai elite penentu. Orang kuat partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elite partai (ketua umum) tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai. Orang kuat partai ini bahkan bisa menerobos ketentuan partai dan menentukan *policy* partai karena memiliki kelebihan-kebihan diatas rata-rata pengurus partai lainnya. Meminjam istilah Putnam dalam analisa elite, individu seperti ini disebut “orang kuat partai” karena memiliki reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan yang lebih besar dibanding posisinya di partai. Selain konsepsi Suzane Keller dan Robert Putnam diatas, teori tentang *local strongmen*, *bossim* - Migdal, Sidel, Olson cukup relevan digunakan mengkonstruksi konsepsi orang kuat partai, hal ini diurai berikut :

- a. Orang kuat partai diaras lokal dapat menguasai dan mengendalikan partai bukan karena aturan partai yang dibuat untuk mengaturnya tetapi mereka menempati posisi penting dan memastikan alokasi sumber-sumber kekuasaan di partai karena reputasi dan kapasitas yang dimiliki (*own rules*).
- b. Orang kuat partai, bertindak sebagai *predatory power broker*. *Broker* kekuasaan bagi orang-orang yang berkeinginan menjadi elite dan menjadi

- anggota legislatif sekaligus juga melakukan *predatory* untuk memarjinalkan elite yang tidak disukai dengan menggunakan cara kekerasan.
- c. Distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan pada posisi penting dipartai maupun institusi publik yang dilakukan oleh orang kuat partai menumbuhkan pola hubungan *personalism*, *clientalism*, dan relasi *patron client*.
 - d. Strategi *local strongmen* bertahan dalam kekuasaan dengan menggunakan *roving bandit* dan *stationary bandit* mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang kuat partai, antara lain : (1). melakukan kriminalitas dalam apresiasi kekuasaannya. (2). penggunaan *coersive violence* atau kekerasan fisik dalam memerintah; (3). menciptakan ketergantungan : partai, massa, dan elite partai lainnya kepada orang kuat – tercipta relasi *patron-client*; (4). menciptakan ketidakstabilan dalam partai metafor dengan konflik terus menerus.
 - e. Orang kuat partai mengekspresikan kekuasaan dengan jalan kriminalitas dan mereka mampu menghindar dari jeratan hukum baik dari kepolisian maupun pengadilan, ini menandakan bahwa negara lemah (*weak state*) seperti tesis yang diungkapkan oleh Migdal ada benarnya. *State apparatus* kepolisian dan kejaksaan nampaknya “agak tidak berani” bertindak tegas melawan tekanan massa dan tekanan *lobby* dari anggota dewan yang pro orang kuat partai. Sehingga meskipun unsur-unsur kriminalitas yang dilakukan oleh orang kuat *blater* bersama oligarki partai sudah jelas, namun pihak yang berwajib tidak mampu meneruskannya menjadi kasus pidana mereka hanya bisa berdalih bahwa kekerasan fisik yang terjadi di partai adalah “kasus internal partai”.

Orang kuat partai bisa hadir karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, kelebihanannya mengendalikan dan memerintah partai dapat di pergunakan untuk hal-hal positif tetapi juga mungkin diperuntukkan bagi tindakan-tindakan negatif. Ada dua jenis orang kuat partai, orang kuat yang buruk dalam memerintah partai (*bad strongmen*) dan orang kuat yang baik dalam memerintah partai (*good strongmen*). *Bad strongmen* adalah orang yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara-cara non demokratis, tidak menafikan kekerasan dan tidak menabukan segala cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan *good strongmen* adalah orang kuat yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara-cara demokratis, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Dalam pergumulan politik orang kuat ini tidak sendiri, ia dilingkupi oleh sekelompok orang yang bersatu dan memiliki karakter yang sama seperti tengara Pareto, Michel, Mosca : “...Secara internal elite bersifat homogen, bersatu, memiliki kesadaran kelompok. Individu dalam kelompok elite

itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip dan memiliki nilai, kesetiaan, kepentingan yang sama”.

b. Elite Partai Di Aras Lokal Dalam Bentuk Kelompok

1). Elite Oligarki

Oligarki berasal dari bahasa Yunani *oligai* artinya beberapa jadi secara harfiah oligarki adalah negara atau sistem politik yang diperintah oleh beberapa orang. Sistem politik oligarki dikenal pada jaman Yunani kuno dalam sebuah negara kota atau yang lebih dikenal dengan sebutan polis. Soehino (2001) menguraikan pengertian Aristoteles tentang oligarki sebagai berikut : “Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara itu disebut oligarki”. Dengan demikian oligarki adalah bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa orang yang apresiasi kekuasaannya dilakukan dengan cara buruk, sementara cara buruk - kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.

Mengelaborasi pendapat Aristoteles tentang oligarki adalah pemerintahan dipegang oleh beberapa orang tetapi “sifatnya buruk” dan untuk “kepentingan diri sendiri/kelompok”. Oligarki partai di aras lokal adalah sekelompok orang yang memerintah partai dengan cara yang buruk dan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, adapun cara yang buruk dalam memerintah partai diidentifikasi berikut : (1). Menganggap akses, aset, dan jaringan partai adalah miliknya sendiri (*personalisasi partai*). (2). Bila memerintah partai cenderung serba menentukan (*otoriter*). (3). Tidak memberi kesempatan orang lain melakukan kritik terhadap kekuasaannya (*meniadakan kontrol politik*). (4). Dalam memerintah partai sering tidak mengindahkan *fatzon*, ketentuan partai (*inkonstitusional*). (5). Tidak memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elite karena mereka dianggap elite saingan (*tabu terhadap elite tandingan*). (6). Bila ada elite yang potensial menyaingi kekuasaannya ia berusaha untuk menghalang - halangi bila perlu membunuh karier politiknya (*predatory*). (7). Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai politik, bila perlu dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersif*). (8). Akhirnya oligarki partai - sekelompok orang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

2). Elite Demokratis

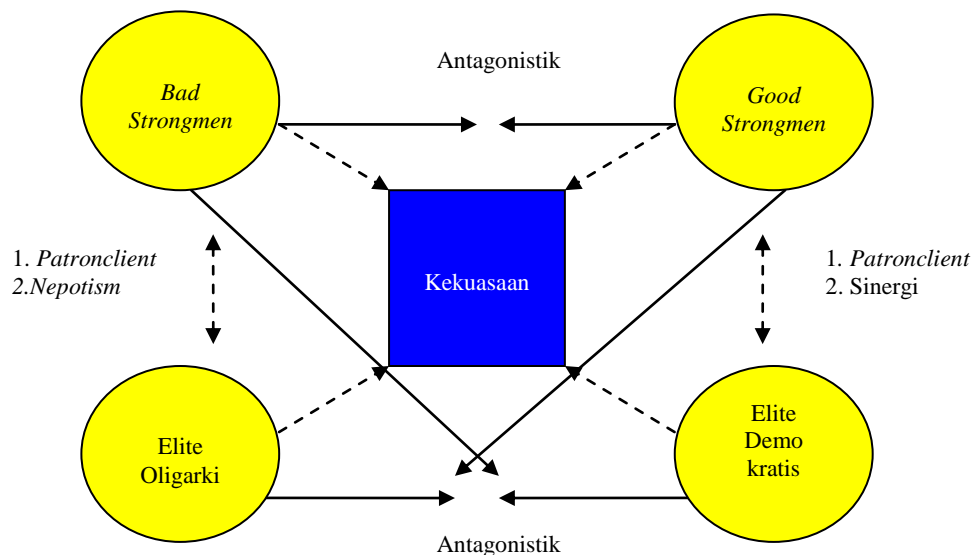
Dinamika politik lokal juga kita temukan elite partai yang memimpin partai dengan cara-cara yang demokratis, adapun pemimpin partai yang demokratis adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1).

Menganggap akses dan aset partai adalah milik partai, kerana itu aset dan akses itu harus dikelola menurut ketentuan partai (*tak melakukan personalisasi partai*). (2). Bila memerintah partai cenderung melibatkan banyak orang (*demokratis*). (3). Memberi kesempatan orang untuk melakukan kritik terhadap kekuasaannya (*tidak tabu terhadap kontrol politik*). (4). Dalam memerintah partai selalu berusaha mengindahkan *fatzon*, tatanan dan ketentuan partai (*konstitusional*). (5). Memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elite kerana mereka dianggap sebagai mitra dalam mengembangkan partai (*tidak tabu terhadap elite tandingan*). (6). Bila ada elite potensial menyaingi kekuasaannya ia cenderung memberi keleluasaan, sambil dia sendiri berusaha meningkatkan kapasitas yang dimiliki sehingga terjadi persaingan yang sehat (*pergumulan kompetitif*). (7). Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai, tidak dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersif*) tetapi menempuh cara persuasif-dialogis. (8). Akhirnya elite demokratis adalah sekelompok orang yang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan mengindahkan *fatzon*, tatanan partai.

Variasi, relasi dan interaksi antar elite dalam pergumulan politik di partai di Kota Malang digambarkan seperti dibawah ini :

Gambar 8.

Variasi, Relasi, Interaksi Elite Partai di Kota Malang



Penjelasannya : (1). Tujuan utama pergulatan politik antar elite partai di aras lokal adalah kekuasaan. (2). Pergulatan politik meraih kekuasaan di partai

ini melibatkan variasi elite : *Good strongmen*, *bad strongmen*, elite demokratis dan elite oligarki. (3). Elite demokratis bersinergi dengan *good strongmen*, elite oligarki bernepotis dengan *bad strongmen*. (4). Dua kelompok memiliki perilaku politik berbeda ini berlawanan dan ingin saling mendominasi kekuasaan sehingga di partai tercipta relasi dan interrelasi antagonis, diilustrasikan berikut ini :

D. Elite Partai di Aras Lokal : *Blater Versus Lora*

1. Variasi Elite PAN di Kota Malang.

Variasi elite partai adalah ragam jenis elite partai dengan karakteristik tertentu yang melekat pada dirinya untuk mewujudkan kekuasaan di partai politik. Dalam bentuk individu maupun kelompok perbedaan karakteristik elite ini nampak dalam konteks memperoleh, mengapresiasi dan mempertahankan kekuasaan - dengan cara demokratis atau sebaliknya. Cara demokratis adalah strategi elite untuk berkuasa dengan memaksimalkan kemampuan persuasif, mengoptimalkan kapasitas diri, menggunakan mekanisme dan prosedur partai, serta mematuhi aturan partai. Sementara cara non demokratis adalah cara sebaliknya. Pergulatan politik selama 8 tahun terakhir ini di DPD PAN kota Malang terdapat variasi elite sebagai berikut :

a). Orang kuat *Blater* dan Orang kuat *Lora*

Orang kuat dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kelebihan luar biasa yang dengan kelebihannya dia dapat mempengaruhi orang lain agar menuruti keinginannya, ketika keinginannya itu dituruti oleh orang lain maka orang yang mampu menggunakan pengaruhnya itu dianggap / dipercaya sebagai pemimpin baik dalam organisasi formal maupun informal. Orang kuat juga sering tampil sebagai pemimpin formal, berpengaruh, ditaati, didengar suaranya, serta dihormati oleh banyak orang, pengikut atau simpatisannya. Pengaruh orang kuat juga tidak terbatas hanya pada satu aspek kehidupan saja tetapi sering meliputi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Orang kuat tidak terikat dengan organisasi formal, boleh jadi dia tidak terpola dengan struktur pemerintahan. Jika orang kuat berada dalam stuktur kekuasaan formal maka dia akan sangat berkuasa dan sangat disegani, jika berada dalam kekuasaan informal maka orang tersebut sangat besar pengaruhnya baik dalam menentukan kebijakan maupun menjalankan kebijakan. Kadangkala seluruh kebijakan yang dibuat oleh penguasa formal adalah merupakan kontribusi, kepentingan dan pikiran dari orang kuat. Intinya, karena orang kuat memiliki keunggulan-keunggulan dibanding rata-rata orang disekelilingnya, maka orang tersebut dilekati semacam hak – hak keutamaan dalam lingkungan masyarakat

tertentu seperti : hak untuk memerintah dan membuat produk aturan tertentu, hak untuk menguasai sumber ekonomi, hak untuk menyatakan keabsahan atau benar tidaknya suatu perbuatan atau tindakan tertentu ditengah – tengah masyarakat. Kelebihan orang kuat mempunyai kemampuan untuk mengadakan perubahan kearah perbaikan dan dengan kemampuan dan pengaruhnya yang sangat besar itu bisa dimanfaatkan kearah yang positif. Kekurangannya orang kuat dalam menjalankan kekuasaan mempunyai kecenderungan otoriter dan tidak demokratis.

Demikian pula di DPD PAN kota Malang, orang kuat partai bisa hadir karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, kelebihanannya mengendalikan dan memerintah partai dapat di pergunakan untuk hal-hal yang positif tetapi juga mungkin diperuntukkan bagi tindakan-tindakan yang negatif. Ada dua jenis orang kuat partai, orang kuat yang buruk dalam memerintah partai (*bad strongmen*) dan orang kuat yang baik dalam memerintah partai (*good strongmen*). *Bad strongmen* adalah orang yang cara mengapresiasi kekuasaannya di PAN dengan cara-cara non demokratis, tidak menafikan kekerasan dan tidak menabukan segala cara mencapai tujuan, sedangkan *good strongmen* adalah orang kuat yang cara mengapresiasi kekuasaannya di PAN dengan cara-cara yang demokratis, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan segala cara mencapai tujuan.

Karakteristik orang kuat partai di PAN kota Malang di formulasikan sebagai berikut : (1). orang yang secara formal bukan ketua umum dalam kepengurusan partai, namun karena memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat, maka orang tersebut mendominasi berbagai kebijakan partai misalnya : menentukan ketua umum dan sekretaris partai, menentukan susunan struktur pengurus harian partai, menentukan calon legislatif, menentukan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan dan lain-lain; (2). dalam banyak hal, peranan individual orang kuat dalam menentukan berbagai kebijakan partai mengalahkan kolektif kolegialitas pengurus DPD PAN kota Malang; (3). dalam konteks politik tertentu, kemauan orang kuat dapat mengalahkan ketentuan partai dalam pengaturan organisasi; (4). antara orang kuat partai dan kelompok elite disekelilingnya terjadi hubungan yang *patron-client*.

Perdebatan saya pribadi dengan beberapa teman telah sampai pada kesimpulan sementara bahwa menurut mereka² tidak tepat penggunaan istilah *bad*

² Perdebatan ini berkisar antara istilah istilah *bad strongmen* untuk Komsis dan *good strongmen* untuk Ali Ja'far. Mereka seperti : Hamzah (mahasiswa UMM), Faturrohman (LSM), Mujahidin (Sarjana Tarbiyah) mengusulkan supaya mencari istilah lain, diskusi kelompok 12-11-2006

strongmen dan *good strongmen*³ untuk mengidentifikasi perilaku politik Komsu dan Ali Ja'far, alasannya istilah ini sudah memasuki wilayah filsafat politik dan etika politik, baik dan buruk di politik adalah suatu konteks yang sangat kabur bahkan politik menurut mereka yang penting adalah bagaimana dapat meraih kekuasaan. Meski tidak setuju seratus persen terhadap pendapat mereka, saya berusaha mencari referensi yang cocok untuk menjadi metafor dari orang kuat di PAN kota Malang. Agaknya yang cocok untuk memetakan orang kuat PAN adalah tulisan tentang *Kyai dan Blater*.⁴

Blater adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengandalkan kekuatan fisik (*carok*)⁵, populer disebut juga jagoan ala Madura. Fenomena *blater* di kaji secara mendalam oleh Abdur Rozaki (2004). Menurut penulis ini di Madura ditemukan bahwa politik lokal yang selama ini diidentifikasi banyak dipengaruhi oleh peran Kyai dan ulama ternyata elite politik lokal seperti *klebun* (kepala desa) banyak di kuasai oleh *blater*, oleh karena itu *kiai* dan *blater* sebenarnya memiliki pengaruh yang saling bersaing di aras lokal Madura terutama di Bangkalan dan Sampang, karena itu Rozaki menulis buku - *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai rezim kembar di Madura*. Bahkan dalam tulisan lainnya Rozaki (2006) juga mengulas tentang Bupati Bangkalan sekarang Kyai Fuad Imron sebagai *Kyai Blater* menggabungkan tradisi yang berbeda *Kyai* dan *Blater* karena Bupati yang diusung oleh PKB ini secara genetik anak turun langsung dari Kyai Cholil Madura namun ketika muda banyak bergumul dengan kalangan *Blater* di Bangkalan.

Blater di Madura dan didaerah tapal kuda memiliki lingkungan, komunitas, jaringan, relasi dan tradisi tersendiri yang berbeda dengan komunitas lain seperti kalangan santri. Tradisi *blateran* antara lain : (a). *Remoh*, adalah kebiasaan berkumpul para *blater* yang melakukan aktivitas seperti *tayub* dilengkapi dengan tandak/sindennya biasanya juga beredar minuman keras, semakin banyak orang yang datang maka tuan rumah semakin naik status sosialnya. (b). *Carok*, tradisi kekerasan adu fisik dengan menggunakan *todik*,

³ Penulis menggunakan istilah *bad strongmen* dan *good strongmen*, terinspirasi oleh istilah-istilah populer dan karakteristik yang sering digunakan dalam khazanah ilmu pemerintahan misalnya : *bad government dan good governance*

⁴ Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman saya Hamzah Utomo karena dengan lontaran spontan dan pembacaannya menyodorkan konsep tentang elite *Blater* dan *Lora*, terus terang dari ide-idenya tulisan ini memperoleh sandaran teoritik.

⁵*Blater* di Bangkalan identik dengan *bajing* di Sumenep. *pecalang* di Bali, *jagoan* di Betawi dan *jawara* di Banten dalam pembicaraan sehari – hari mereka ini sering disebut *preman*.

monteng, atau *arek* untuk membela kehormatan diri dan keluarganya. Dalam carok inilah *blater* yang berperkara tidak dipersoalkan apakah salah atau benar (Rozaki :2005), sendiri-sendiri atau keroyokan (Latif Wiyata :2002) yang penting berani dan menang, jika menang maka status keblaterannya akan diakui semakin tinggi, status sosialnya meningkat . (c). Dalam tradisi berkumpul mereka senang melakukan : sabung ayam, pencak silat, kerapan sapi dan permainan lainnya.

Secara geopolitik dimasa lalu kota Malang di potret termasuk daerah mentaraman, daerah yang membentang dari Malang ke barat yang memiliki tipologi dipengaruhi oleh kultur mataram, masyarakat “abangan” sangat kental, tradisi jawa sangat kuat dan didominasi oleh partai nasionalis. Sementara daerah Pasuruan ke timur sampai banyuwangi adalah daerah tapal kuda dengan tipologi mayoritas masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh tradisi santri dan partai yang dominan adalah partai Islam. Pengamatan saya di Malang Timur tidak termasuk daerah mentaraman, tetapi dilihat dari religiopolitik karakteristiknya hampir mirip dengan daerah tapal kuda, budaya santri masih begitu kental, etnis madura cukup dominan, karena itu di Malang timur sebagai *regional setting* tulisan ini perlu dikemukakan bahwa kultur Madura dan tradisi *keblateran* masih bisa dilacak eksistensinya⁶.

Sementara didaerah tapal kuda juga ada legenda tokoh *blater* yang sampai sekarang masih dipelihara menjadi *tutur tinular* – yakni Sakerah. Sakerah adalah *blater* pasuruan terkenal karena *kedigdayaannya* melawan kompeni yang menindas petani tebu, dengan ciri khas memakai baju gombor hitam-hitam, kaos belang merah putih, memakai udeng, dan menyengkelit clurit. Sakerah adalah manifestasi tokoh heroik diaras lokal yang mengandalkan kemampuan fisik (*carok*) dalam membela keadilan dan kehormatan. Dan sakerah menjadi semacam panutan bagi mereka yang bertradisi *blater*.

Pencermatan penulis terhadap *blater* di Malang dalam berbagai *event* politik⁷ sering hanya digunakan untuk menjadi *asesoris* politik. Asesoris yang

⁶Dalam dialog dengan beberapa informan tentang masalah : *blater*, keberanian carok, tradisi *blater* di Malang selalu dikaitkan dengan suatu desa namanya Galis di bangkalan, para informan selalu membanggakan bahwa seorang *blater* yang asal-usulnya dari Galis pasti orang tersebut memiliki keberanian untuk bercarok. Dan pengakuan asal-usul seseorang yang berasal dari Galis sering kali hanya digunakan untuk *pengendel* dan menggertak lawan.

⁷*Event* politik yang dimaksud adalah Pilgub, Pilkada dan Pemilihan legislatif. La Nyalla M. Mattalitti ketua DPW Partai Patriot sebagai tim sukses Kaji dalam rangka Pilgub Jatim pada tanggal 22 Juni 2008 terang-terang mengundang Tokoh *Blateran* dan *Klebung* se Madura untuk mensukseskan Kaji. Peni – Bambang Priyo (IYO) di Pilkada kota Malang juga menggunakan *Blateran* – ketika presentasi calon wali/wawali kota Malang dihadapan DPRD tahun 2008 - di jalan seputar tugu digunakan atraksi pencak silat “Sakerah Anshar” kelompok *Blateran* dari

yang dimaksud tidak saja hanya sebagai pengaman, *pengandel*, pengumpul masa, namun juga kemampuan fisik mereka seperti pencak silat dapat digunakan untuk atraksi dalam berbagai *event* kampanye. Karena itu dalam konteks politik ini *blater* berfungsi antara lain sebagai : (a). *bumper* politik artinya dengan menggaet para *blater* - partai, caleg, calon walikota/wawali - merasa punya barisan pengaman dari gangguan pihak lain, karena *blater* dengan kemampuan-kemampuan fisik dan caroknya dapat digunakan sebagai *bumper* jika sewaktu-waktu terjadi konflik fisik. (b). *pengandel*⁸ artinya dengan berkumpulnya para *blater* - partai, caleg, calon walikota/wawali merasa punya barisan yang dapat menguatkan hati – membuat diri lebih berani agar terus maju menghadapi berbagai tantangan dan resiko politik yang kadangkala tak terduga dan sering diluar prediksi. (c). pengumpul massa dan pengumpul suara artinya dengan relasi yang dibina oleh para *blater* sebenarnya mereka memiliki lingkungan, komunitas dan jaringan sosial, ekonomi, politik yang kurang lebih cukup mapan - karena itu dengan memanfaatkan *blater* sebenarnya sama dengan memanfaatkan mereka untuk pengumpul massa dan pengumpul suara. (d). Atraksi pemanis suasana politik. Kemampuan *blater*⁹ memperagakan pencak silat, *bantengan*, kuda lumping, tunil dan lain-lain merupakan atraksi penghibur sedikit merenggangkan syaraf dalam suasana politik yang kadangkala penuh intrik, memanas dan penuh persaingan.

Orang kuat *blater* yang hendak kita telaah ini tidak hanya sekedar menjadi *asesoris* politik namun lebih dari itu ia mampu melakukan penetrasi pengaruh, mendominasi partai dan mengapresiasi kekuasaan dengan kapasitas yang dimiliki kemudian menjadi elite antagonis yang membawa nuansa partai penuh konflik. Komsis ditilik dari karatannya mirip dengan orang yang memiliki kultur *blater*, ia dilahirkan sebagai orang yang beretnis Madura, pernah menjadi lurah, sejak mudanya senang dengan adu fisik dalam menyelesaikan masalah. Ia punya pengaruh dilingkungan *blateran* di daerah Kedungkandang yang sewaktu-waktu bisa dimobilisasi oleh Komsis. Kedungkandang adalah salah satu kecamatan di kota Malang yang letaknya di sebelah timur kota. Dimasa lalu dikecamatan ini

Baran kelurahan Buring. Demikian juga di Pileg 2009 beberapa caleg dari berbagai partai menggunakan jasa para *blater* untuk pendulang suara.

⁸ Pengandel dari kata kendel (bahasa Jawa) artinya berani

⁹ Dalam rangka memperkaya informasi peneliti juga terjun kelapangan untuk mencermati fenomena *blater* di daerah kedungkandang, di daerah ini kita dapatkan bahwa ciri khas *blater* antara lain mereka punya kebiasaan menggunakan songkok/kopiah hitam dengan ukuran yang tinggi kurang lebih 15 cm keatas untuk membedakan dengan orang lain.

etnis Madura cukup dominan, menurut informan¹⁰ istilah *blater* juga sangat di kenal oleh masyarakat Kedungkandang. Ini berarti secara sosiologis asal usul masyarakat Madura di kecamatan ini berasal dari Bangkalan dan sampang.

Masih di Madura, menurut Latief Wiyata (2006) lapisan sosial di lingkungan pondok pesantren Madura hanya ada tiga : (1) *Keyae*, menunjuk pada orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai ilmu agama (2) *bhindhara* adalah orang-orang yang telah menamatkan pendidikan pondok pesantren sehingga mereka memiliki pengetahuan keagamaan meskipun belum setaraf kyai; dan (3). *Santrre*, adalah siswa yang mondok di pesantren untuk mendalami ilmu ke-Islaman. Berbeda sedikit dengan pendapat di atas, tiga orang Sumenep Madura : Ira, Imam, Syaiful¹¹, mereka mengatakan bahwa dalam stratifikasi sosial di lingkungan pondok pesantren berdasarkan pengaruhnya ditemui piramida elite sebagai berikut : (1). *Kyai* adalah pemilik, pengasuh dan pemangku pondok, *Kyailah* yang bertugas mentransformasikan ilmu ke-Islam-an seperti fiqih, hadits, tafsir yang sering disebut kitab kuning kepada santri, (2). *Lora* ada beberapa pengertian : (a). anaknya kyai (Rozaki : 2005) atau Gus dalam tradisi pesantren di Jawa, (b). Anak kyai yang tidak mau atau belum menjadi kyai, (c). Anak kyai atau bukan tetapi tugasnya adalah memanager pesantren seperti : membangun fasilitas gedung, memperluas area pondok, penghubung kyai dengan pihak luar, membuat jaringan antar pondok, memfasilitasi kyai dan keluarganya, mensinergikan komponen-komponen pondok dan lain-lain. (d). Orang kepercayaan atau ajudan kyai, yang ta'zim kepada perintah kyai (3). *Bindere* adalah santri senior yang tugasnya disamping nyantri tetapi juga membantu kyai mengajar kepada santri junior, (4). *Santrre* adalah siswa yang menetap di pondok pesantren dalam kurun waktu tertentu untuk mempelajari kitab kuning. Pondok memiliki tradisi dan lingkungan sendiri tetapi mereka juga bisa mempengaruhi lingkungan sosial di masyarakat sekitarnya. Di Madura lingkungan pesantren adalah lingkungan yang sangat berpengaruh secara religio-politik, masyarakat di sekitar juga terpengaruh oleh apa yang menjadi afiliasi pondok pesantren dalam mengikuti arus politik, artinya ketika Kyai berafiliasi kepada partai tertentu otomatis santri mengikuti jejak sang Kyai begitu juga masyarakat di sekitarnya.

Orang kuat partai berikutnya yakni - Ali Ja'far dilihat dari karakter hampir sama dengan orang yang memiliki kultur *Lora* dalam tradisi pesantren di Madura. Ia

¹⁰ Wawancara tanggal, 7 Pebruari 2007

¹¹Tiga orang tersebut adalah orang yang dibesarkan di lingkungan pondok pesantren di Sumenep Madura, dialog dengan mereka dilakukan pada tanggal 25 dan 26 Desember 2006

memang ketua pondok Munawarroh di Kedungkandang, ketika muda ia sempat mondok di Sidogiri Pasuruan, senang dengan membangun dan memperluas pondok, sangat *ta'zim* kepada kyai, Ali Ja'far mampu mensinergikan komponen pondok, singkatnya Ali Ja'far sangat kental dengan tradisi santri. Persoalannya kemudian adalah bagaimana *Blater* Komsu dan *Lora* Ali Ja'far mentransformasikan pengalaman hidupnya dalam dinamika partai politik khususnya di PAN kota Malang.

b). Elite Oligarki di DPD PAN Kota Malang

Oligarki partai di aras lokal adalah sekelompok orang yang memerintah partai dengan cara yang buruk dan untuk kepentingan diri sendiri/kelompoknya, adapun cara yang buruk dalam memerintah partai bersimbol matahari ini diidentifikasi sebagai berikut : (1). Menganggap akses, jaringan dan aset partai adalah miliknya sendiri, karena itu ia bisa menggunakan sesuai dengan keinginannya (*personalisasi partai*); (2). Dalam memerintah partai cenderung serba menentukan yang seringkali mengabaikan representasi permusyawaratan orang banyak (*otoriter*); (3). Tidak memberi kesempatan orang lain untuk melakukan kritik terhadap kekuasaannya (*meniadakan kontrol politik*); (4). Dalam memerintah partai sering tidak mengindahkan *fatzon*, tatanan dan ketentuan partai (*inkonstitusional*); (5). Tidak memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elite karena mereka dianggap elit saingan (*tabu terhadap elite tandingan*); (6). Bila ada elite yang potensial menyaingi kekuasaannya ia berusaha untuk menghalang-halangi bila perlu membunuh karier politiknya (*predatory*); (7). Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai politik, bila perlu dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersif*); (8). Akhirnya elite oligarki adalah sekelompok orang yang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

c). Elite Demokratis di DPD PAN

Dalam dinamika politik lokal juga kita temukan sekelompok elite partai yang memimpin partai dengan cara-cara yang demokratis, terbuka, kekeluargaan, mengedepankan permusyawaratan. Adapun kelompok elite partai yang demokratis adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1). Menganggap akses, jaringan dan aset partai adalah milik partai, oleh karena itu aset, jaringan dan akses itu harus dikelola menurut ketentuan partai (*tidak melakukan personalisasi partai*); (2). Dalam memerintah partai cenderung melibatkan representasi orang banyak (*demokratis*); (3). Memberi kesempatan orang untuk melakukan kritik terhadap kekuasaannya (*tidak tabu terhadap kontrol politik*); (4). Dalam

memerintah partai selalu berusaha mengindahkan *fatzon*, tatanan dan ketentuan partai (*konstitusional*); (5). Memberi kesempatan orang yang ingin berkembang menjadi elite, mereka dianggap sebagai mitra dalam mengembangkan partai (*tidak tabu terhadap elite tandingan*); (6). Bila ada elite yang potensial menyaingi kekuasaannya ia cenderung memberi keleluasaan, sambil dia sendiri berusaha untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki sehingga terjadi persaingan yang sehat (*pergumulan kompetitif*); (7). Untuk mempertahankan kekuasaannya di partai politik, tidak dilakukan dengan jalan kekerasan (*coersif*) tetapi menempuh cara persuasif-dialogis; (8). Akhirnya elite demokratis adalah sekelompok orang yang berusaha mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan mengindahkan *fatzon*, tatanan dan ketentuan partai.

2. Apresiasi Kekeuasaan Orang Kuat *Blater*

Eksistensi orang kuat partai menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan di partai politik, sementara partai yang demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam menentukan berbagai konteks kebijakan partai. Karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai seperti PAN kota Malang ini menjadi dilema tersendiri. Dilema yang dimaksud adalah : (1). kehadiran orang kuat *blater* di partai ini semula diperlukan sebagai pengumpul massa dan pengumpul suara, sebagai *bumper* dan *pengandel* tatkala berhadapan dengan pihak eksternal partai – seperti kita ketahui bahwa *blater* secara individu maupun kelompok memiliki lingkungan, komunitas, akses dan jaringan sosial ekonomi politik yang relatif cukup mapan - karena itu keberadaan orang ini di partai menambah nilai lebih untuk memperbesar konstituen PAN. Namun ketika mendominasi partai - *blater* - dengan kekuasaan yang sedemikian masif tentu hal ini justru banyak menghilangkan simpati konstituen. (2). kehadiran orang kuat partai memiliki kelemahan, otoritas individualnya dalam menentukan *policy* bisa digunakan *bumper* bagi elite yang ingin merengkuh kekuasaan dengan jalan pintas tidak melalui jalan kompetisi. Para elite ini mengandalkan relasi dan kedekatan dengan orang kuat partai untuk mendapatkan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan contohnya seperti pada “pencalegan” tahun 1999 dan tahun 2004. Karena itu keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat melimitasi sekaligus juga mereduksi berlakunya peraturan partai dalam pengaturan dinamika internal partai di aras lokal.

Kerekatan relasi yang didasarkan atas hubungan saling memanfaatkan dan mengekspresikan kepentingan yang sama antara orang kuat *blater* bersama

oligarki partai tercipta pola hubungan *patron - client* . Dan untuk itu mereka sukses dalam berbagai konteks kekuasaan di DPD PAN kota Malang, misal : (1). Berhasil mengintrodusir kepemimpinan presidium untuk mengeliminasi kepemimpinan DPD yang absah. (2). Sukses mengamankan pencalegan dengan menempatkan orang dari lingkaran mereka untuk posisi sekretaris PPD II sebagai penyelenggara Pemilu di kota Malang. (3). Berhasil menempatkan empat orang dekatnya untuk jadi anggota parlemen lokal di kota Malang tahun 1999 - 2004. (4). Sukses menyelenggarakan Musyda PAN I tahun 2000 dengan memosisikan Ucik dan Manaf masing-masing sebagai ketua dan sekretaris DPD. (5). Berhasil menopang terpilihnya Sulton Amin sebagai ketua dalam Muswil DPW PAN Jatim tahun 2000. Namun sukses mereka dalam mengapresiasi kekuasaan dengan jalan natifisme berakibat buruk bagi pencitraan partai. Hasil diskusi dengan sekelompok informan - secara garis besar implikasi dari apresiasi kekuasaan orang kuat *blater* bersama oligarki partai adalah : (a). Mengubah operasionalisasi sistem dan mekanisme partai, (b). Mereduksi peran kolektifitas pimpinan partai. (c). Melimitasi peran kontrol dari struktur organisasi di atasnya/DPW. (d). Mereduksi berlakunya aturan partai. (e). Meniadakan kontrol dan jaring aspirasi dari struktur organisasi dibawahnya (DPC/DPRT).

Karena itu, Akibat dari apresiasi kekuasaan *Blater* bersama oligarki partai di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional kota Malang selama tahun 1999 – 2004 terjadi hal-hal sebagai berikut : (a). Sistem dan mekanisme partai tidak berjalan normal, pusat kekuasaan berpindah ke arena politik-elite oligarkis. Sementara sistem partai menjadi tidak demokratis, saluran informasi hanya tunggal dari atas kebawah (*top-down*). Aspirasi, kepentingan, apresiasi dari struktur dibawahnya tidak terwadahi dengan baik. (b). Kolektif kolegialitas dalam pengaturan partai diganti oleh dominasi individual orang kuat partai, ketua DPD dan pengurus harian PAN lainnya hanya semacam simbol, karena pada akhirnya semua keputusan partai tergantung orang kuat bersama elite oligarki. (c). Struktur politik di atas : DPW PAN Jatim tidak cukup mampu mengatasi hal ini, jika ada *policy* DPW PAN yang merugikan orang kuat partai dan oligarki partai, DPW PAN Jatim akan “digruduk” oleh mereka dan cara ini telah dilakukan berkali-kali bersama satgas *Blue Force*, sehingga DPW tidak mampu menyelesaikan masalah DPD PAN kota Malang. Menekan dan mengganti struktur DPC, DPRT, yang tidak loyal kepada DPD bentukan orang kuat partai dan elit oligarki, sementara Struktur politik dibawahnya : DPC, DPRT mengalami konflik atau tak terurus sehingga jaringan politik kebawah sampai kepada konstituen PAN

terputus. (d). Menentukan “calon jadi” anggota legislatif tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh AD/ART dan ketentuan partai, tetapi caleg disandarkan pada keputusan orang kuat akibatnya mereka yang dekat dengan orang kuat *blater* yang menjadi nominasi ”calon jadi” anggota legislatif, sementara mereka yang memiliki potensi dan kompetensi karena tidak dekat dengan orang kuat *blater* mereka harus puas hanya menjadi calon alternatif atau kecewa tidak dinominasikan. (e). Pemanfaatan sumber-sumber kekuasaan seperti : keuangan, sarana prasarana, jabatan, diatur secara eksklusif tidak transparan. (f). Tidak memberi ruang yang memadai untuk berkembangnya kompetisi yang sehat bagi mereka yang berhasrat untuk menjadi elite dan menjadi anggota legislatif. Mereka juga menekan dan mengeliminasi kekuatan - kekuatan, kelompok - kelompok atau aktor yang mempunyai potensi untuk mensubversif elite oligarki. Mereka para elite yang tidak setuju dengan orang kuat partai ini dianggap membahayakan eksistensi oligarki dan berpotensi untuk menjadi elite tandingan. (g). Banyak elite dan kader pengumpul massa (*votegetter*) tersingkir dari PAN, disingkirkan atau menyingkir sendiri karena sistem pengaturan organisasi tidak kondusif lagi bagi mereka yang ingin berkiprah dalam politik.

Singkatnya, nafisme apresiasi kekuasaan orang kuat *blater* bersama oligarki partai berimplikasi partai mengalami *declane* dalam berbagai dimensi : sistem dan mekanisme partai macet, elite dan pengurus partai konflik, simpati massa dan konstituen menurun, perolehan suara dalam pemilu berkurang. Namun sekuat apapun elite bertahan dalam kekuasaan, pada akhirnya ia tergantikan oleh elite berikutnya yang lebih memiliki kapasitas. Orang kuat *blater* yang memperoleh, mengapresiasi dan mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan jalan kekerasan – dengan kekerasan pula ia lengser dari DPD PAN kota Malang.

3. Sirkulasi Elite dan Perubahan orang Kuat Partai

Sirkulasi elite di partai politik adalah : (1) pergantian elite partai yang lama kepada elite partai yang baru dimana elite partai yang lama telah kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan dan memerintah partai, sementara elite partai yang baru memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memerintah partai melebihi apa yang dimiliki oleh elite partai yang lama; (2). pergantian elite karena kapasitas elite partai yang baru dalam penggunaan dan pemanfaatan kekuasaan melebihi kapasitas yang dimiliki oleh elite partai yang lama; (3). pergantian elite karena elite partai yang baru memenangkan pergulatan kompetitif dalam berebut kekuasaan melawan elite partai yang lama.

Sirkulasi elite di partai umumnya juga dibagi dalam dua kemungkinan : *pertama*, pergantian elite partai dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan kekuatan (koersif), pergantian elite ini dilakukan dengan cara-cara non demokratis sehingga mengakibatkan : (1). Harmoni di internal partai terganggu, (2) mekanisme partai berubah radikal dari mekanisme partai yang demokratis menjadi mekanisme partai yang non demokratik. *Kedua*, pergantian elite partai dengan menggunakan cara persuasif yakni pergantian elite dengan cara-cara demokratis yang implikasinya terjadi : (1). proses perubahan partai politik secara gradual, (2). harmoni dalam internal partai politik akan tetap terjaga, (3). mekanisme partai yang demokratis tetap terjaga dengan baik . Dengan demikian pengaruh pergantian elite partai terhadap perubahan sistem dan mekanisme partai tergantung kepada : (1). penggunaan cara dalam melakukan pergantian, dan (2). tergantung pula kepada elite baru yang menggantikan elite lama,

Pergantian orang kuat *blater* kepada orang kuat *lora* dari puncak piramida kekuasaan DPD PAN kota Malang disebabkan karena orang kuat yang pertama telah kehilangan kemampuannya memerintah dan mengendalikan PAN sementara orang kuat kedua justru sebaliknya memiliki kemampuan untuk memerintah dan mengendalikan partai. Kapasitas Ali dalam memanfaatkan kekuasaan melebihi apa yang dimiliki Komsis dan ini adalah hasil dari pergulatan politik antar elite yang saling berseberangan di partai berlambang matahari tersebut. Sirkulasi elite dari orang kuat *blater* kepada orang kuat *lora*, menumbuhkan semangat untuk melakukan konsolidasi demokrasi di internal partai. Orang kuat partai ini memiliki *back ground* karakter yang egaliter, terbuka, santun, tidak suka kekerasan dan sangat ta'zim kepada kyai serta pemimpin yang dihormati. Dengan kapasitas yang dimiliki ia mampu mensinergikan dan mempengaruhi elite dikelilinginya untuk memiliki perilaku yang lebih terbuka dan demokratis terutama dalam kaitannya mengelola partai. Perubahan perilaku elite ini memberi harapan untuk merubah kinerja DPD PAN kota Malang menjadi lebih baik.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang kuat *lora* bersama *inner cycle* di Partai Amanat Nasional kota Malang adalah sebagai berikut : (1). mengubah wacana dan aksi kekerasan menjadi proses politik yang dialogis – persuasif; (2). memperluas kapasitas jaringan politik internal dan eksternal PAN agar lebih bisa diterima oleh masyarakat kota Malang; (3). Melakukan konsolidasi di internal DPD PAN agar PAN lebih solid ; (4). melakukan upaya pendidikan politik untuk mengubah perilaku elite PAN agar mereka memiliki perilaku yang demokratis; dan (5). memberi keleluasaan elite PAN untuk berkompetisi dalam

berebut kekuasaan. Perubahan wacana dan aksi ini dilakukan agar PAN menjadi partai yang lebih terbuka, demokratis dan menghindari konflik yang tidak perlu, dengan harapan agar PAN lebih bisa diterima oleh masyarakat kota Malang yang prural. Sebagai catatan selama orang kuat partai ini berkuasa terjadi pembakuan politik nirkekerasan sejak tahun 2004 sampai sekarang.

Tanpa harus menggunakan kekerasan, orang kuat *lora* ini dalam berbagai konteks kekuasaan sukses antara lain : (1). Sukses menghantarkan Ali Musallam Mahri sebagai ketua DPD Pan kota Malang, tanpa melalui Musda luar biasa menggantikan Oetojo Sardjito yang mengundurkan diri dari ketua umum. (2). Berhasil menghantarkan empat orang dekatnya menjadi anggota DPRD kota Malang periode 2004 – 2009. (3). Sukses menghantarkan Mohan dan Pujianto masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PAN kota Malang.

E.Strategi Bertahan Elite Partai di Aras Lokal

Setiap elite ingin melanggengkan kekuasaan, bagi elite kekuasaan telah memberikan segala-galanya mulai dari kemudahan sampai pengaruh yang besar untuk memerintah orang lain, oleh karena itu sumber-sumber kekuasaan yang dipegangnya harus dipertahankan sampai kapanpun, banyak cara untuk melanggengkan kekuasaan mulai dari penggunaan kekerasan (koersif) sampai pada bujukan (persuasif), mulai dari penguatan kelompok militer agar berdiri memagari dari unsur-unsur subversif terhadap kekuasaannya sampai kepada meningkatkan popularitas melalui *marketing* politik agar dalam pemilihan umum dan pilkada menjadi *incumbent*.

Orang kuat partai yang buruk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara : (a). melakukan kriminalitas dalam apresiasi kekuasannya. (b). penggunaan *coersive violence* atau kekerasan fisik dalam memerintah; (c). menciptakan ketergantungan : partai , massa, elite lain kepada orang kuat (relasi *patron-client*); d). menciptakan ketidak stabilan dalam partai (konflik terus menerus). Sebaliknya orang kuat partai yang baik melanggengkan pengaruh dan kekuasaannya di partai menggunakan cara : (a). berusaha menjadi populis – mendekati diri kepada massa PAN yang mendukungnya; (b). mencari pengganti dilingkungan elite PAN sendiri – orang yang dipercaya dan dapat menopang pengaruh orang kuat tersebut di PAN; (c). mengeksploitasi dirinya agar bermanfaat bagi masyarakat dan PAN; (d). menyerahkan aset dan akses yang dimilikinya untuk kepentingan PAN; (d). bertindak sebagai bapak masyarakat yang berfungsi sebagai penasehat, pemberi petunjuk, memberi saran kepada partai atau elite PAN.

Elite oligarki adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, karena itu mereka berusaha mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya, adapun cara-cara untuk melanggengkan kekuasaan kelompok ini adalah : (a). meningkatkan solidaritas diantara elite oligarki PAN; (b). memperkecil ruang dan lingkaran kekuasaan bagi masuknya elite baru kedalam oligarki. (c). mengeliminasi elite potensial dan elite tandingan agar tidak menjadi pesaing yang membahayakan kekuasaannya di PAN ; (d). mengeliminasi orang, kelompok, kekuatan – kekuatan di PAN yang dianggap menggerogoti kekuasaannya dengan cara : intimidasi, *pressure*, membunuh karakter, sabotase, adu domba, sampai pada penggunaan kekerasan fisik.

Elite demokratis juga berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, adapun cara untuk mempertahankan kekuasaannya adalah sebagai berikut : (a). Berusaha meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga kapasitas yang dimiliki sejalan dengan perkembangan PAN dan dinamika keinginan konstituen; (b). Meningkatkan kapasitas jaringan PAN baik vertikal maupun horisontal, dengan semakin luas jaringan PAN dia sendiri juga dikenal (*populer*) dilingkungan internal partai, (c). Melaksanakan agenda-agenda PAN yang menjadi kesepakatan bersama agar PAN lebih berkembang menjadi besar (d). Melakukan kompetisi yang sehat untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaannya di PAN.

F. Penutup

Pelajaran yang bisa kita petik - *lesson learned* - dari kasus diatas : (1). eksistensi orang kuat partai menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan, sementara partai yang demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam menentukan berbagai konteks kebijakan partai, karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai menjadi dilema tersendiri yakni : dilema posisi – orang yang menduduki posisi puncak di partai justru menjadi *toy of elite* dari orang kuat, dilema struktur – kolektifitas pengaturan partai dirubah menjadi otoritas individual orang kuat partai, dilema personalisasi institusi – partai seperti miliknya sendiri karena itu pengaturan mekanisme partai diatur sesuai dengan kehendaknya sendiri; (2). Dalam konteks kekuasaan keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat melimitasi sekaligus juga mereduksi berlakunya aturan partai dalam pengaturan dinamika internal partai di aras lokal. (3). Kerekatan relasi didasarkan atas hubungan saling memanfaatkan dan mengekspresikan kepentingan yang sama antara orang kuat *blater* bersama oligarki partai tercipta pola hubungan *patron - client* . Dan untuk itu mereka sukses dalam berbagai konteks kekuasaan di DPD

PAN kota Malang, misal : (a). Berhasil mengintrodusir kepemimpinan presidium untuk mengeliminasi kepemimpinan DPD yang absah. (b). Sukses mengamankan pencalegan dengan menempatkan orang dari lingkaran mereka untuk posisi sekretaris PPD II sebagai penyelenggara Pemilu di kota Malang. (c). Berhasil menempatkan empat orang dekatnya untuk jadi anggota parlemen lokal di kota Malang tahun 1999 - 2004. (d). Sukses menyelenggarakan Musyda PAN I tahun 2000 dan menguasai partai. (4). Berbeda dengan orang kuat *blater* yang mengekspresikan kekuasaan dengan jalan natifisme, orang kuat *lora* berhasil menguasai partai dan menghantarkan orang dekatnya menjadi anggota parlemen lokal tanpa jalan kekerasan, orangkuat partai ini justru mengintrodusir *nir* kekerasan selama ia bersama orang dekatnya mendominasi partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul ed. 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, bab 3, cetakan kedua. Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogya.
- Ari Dwipayana , 2005, Teori Politik, PLOD-UGM, Yogyakarta, hal. 29
- Bottomore, TB, diterjemahkan oleh Abdul Haris, 2006, *Elite dan Masyarakat*, Akbar Tandjung Institute, Jakarta
- Hagopian, Mark N, 1978, *Regimes, Movements, and Ideologies : a Comparative Introduction to Political Science*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Harriss, John dkk diterjemahkan oleh Arya Wisesa, 2005, *Politisasi Demokrasi : Politik Lokal Baru*, Demos, Jakarta
- Haryanto, 1990, *Elit, Massa dan konflik*, Pusat Antar Universitas-Studi sosial, UGM, Yogyakarta, hal. 6
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elite : Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD UGM, Yogyakarta
- Keller, Suzanne, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite –penentu dalam Masyarakat Modern*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Masaaki, Okamoto (ed), 2006, *Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era Reformasi*, IRE Press, Yogyakarta
- Michels, Robert, 1984, *Partai politik : Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, CV Rajawali, Jakarta
- Migdal, Joel. 2001, *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge University Press.
- Miriam Budiarjo, 1991, *Aneka pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta hal. 34

- Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Richard Robinson dan Vedi R Hadis, 2004, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an age of markets*, RutledgeCurzon, New York
- Rozaki, Abdur, 2004, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai rezim kembar di Madura*, Penerbit Pustaka Marwa, Yogyakarta
- Savirani, Amalinda. 2004, *Local Strongmen in New Regional Politics in Indonesia*, thesis.
- Sidel, J. 1999, *Capital, Coercion, And Crime. Bossism in Philippines*, Stanford University Press, Stanford.
- Soehino, 2001, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Kantaprawira, Rusadi, 2004, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Penerbit Sinar Baru Al Gesindo, Bandung
- Varma, SP, 2001, *Teori Politik Modern*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada Jakarta.